

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KAUSALITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GANTI RUGI DALAM SENGKETA PENGUASAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1123 K/PDT/2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi menurut KUHPerdota, mengkaji unsur kausalitas kerugian terhadap perbuatan melawan hukum, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdota berpusat pada Pasal 1365 yang mensyaratkan terpenuhinya empat unsur secara kumulatif yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pada pelaku, kerugian yang diderita pihak lain, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, di mana ganti rugi yang dapat dituntut mencakup ganti rugi materiil dan immateriil. Unsur kausalitas merupakan unsur yang paling sulit dibuktikan karena mensyaratkan hubungan sebab-akibat yang langsung dan nyata, di mana pembuktiannya tidak cukup hanya menunjukkan keterkaitan antara tindakan dan kerugian tetapi juga harus dibuktikan bahwa ketentuan hukum yang dilanggar memang bertujuan melindungi kepentingan pemilik tanah yang sah sebagaimana dikenal dalam teori *schutznorm*. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1123 K/Pdt/2022 telah secara tepat membangun hubungan kausalitas antara penguasaan tanah oleh Tergugat tanpa prosedur yang sah dengan kerugian Penggugat dan mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp14.940.750.000,00, namun penolakan atas ganti rugi immateriil dinilai inkonsisten mengingat penderitaan batin dan gangguan kesehatan yang dialami Penggugat selama lebih dari 17 tahun sesungguhnya memiliki hubungan kausal yang nyata dengan perbuatan Tergugat dan seharusnya dapat dikabulkan secara *ex aequo et bono*.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Kausalitas, Ganti Rugi

ABSTRACT

**LEGAL ANALYSIS OF CAUSALITY OF UNLAWFUL ACTS AND
COMPENSATION IN LAND OCCUPATION DISPUTES BY LOCAL
GOVERNMENT**

(STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1123 K/PDT/2022)

This study aims to analyze the regulation of unlawful acts and compensation under the Civil Code, examine the causality element of damages in unlawful acts, and analyze the judges' legal considerations in Supreme Court Decision Number 1123 K/Pdt/2022. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively using a prescriptive method. The results show that the regulation of unlawful acts in the Civil Code centers on Article 1365 which requires the cumulative fulfillment of four elements namely an unlawful act, fault of the perpetrator, damage suffered by another party, and a causal relationship between the act and the damage, where recoverable compensation includes both material and immaterial damages. The causality element is the most difficult to prove as it requires a direct and real causal relationship, where proof is not sufficient by merely showing a connection between the act and the damage but must also prove that the violated legal provision was specifically intended to protect the legitimate landowner's interests as recognized in the schutznorm theory. The Supreme Court in Decision Number 1123 K/Pdt/2022 has correctly established the causal relationship between the Defendant's unauthorized land occupation and the Plaintiff's losses and granted material compensation of Rp14,940,750,000.00, however the rejection of immaterial compensation is considered inconsistent given that the Plaintiff's prolonged mental suffering and health deterioration experienced for more than 17 years genuinely have a real causal connection with the Defendant's conduct and should have been granted on an ex aequo et bono basis.

Keywords: *Unlawful Act, Causality, Compensation*